

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MASA KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

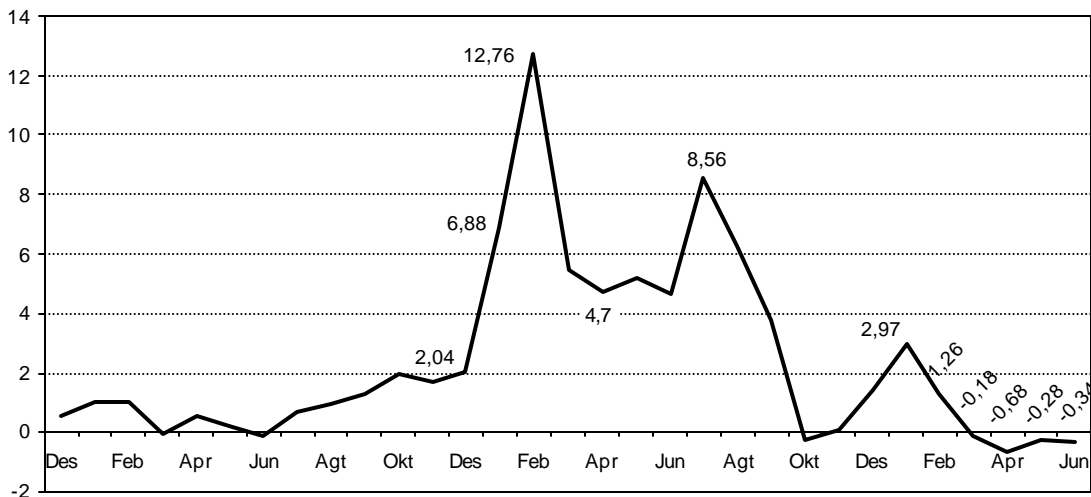
Jakarta, 10 Juli 1999

I. PERKEMBANGAN MONETER DAN KEUANGAN NEGARA

I.1 Laju Inflasi

Laju inflasi pada bulan Juni 1999, yang dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen (IHK) dari 44 kota kembali menunjukkan inflasi negatif (deflasi) sebesar **-0,34%**. Laju inflasi ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi yang terjadi pada bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,64%. Ini berarti untuk pertama kalinya dalam sejarah, perekonomian Indonesia mengalami deflasi dalam empat bulan berturut-turut, masing-masing bulan Maret (-0,18%), April (-0,68%), Mei (-0,28%), dan Juni (-0,34%). Dengan demikian laju inflasi tahun anggaran 1999/2000 menunjukkan inflasi negatif sebesar 1,30%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,29%.

Gambar 1
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan 1996-1999 (dalam persentase)



Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

Laju inflasi dalam enam bulan pertama tahun 1999 (Januari-Juni 1999) tercatat sebesar 2,73%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi periode yang sama tahun 1998 yang mencapai 46,55%. Seperti pada bulan Mei 1999, penyumbang utama terjadinya deflasi pada bulan Juni 1999 adalah menurunnya IHK tiga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar minus 1,15%, kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar minus 0,02%, dan kelompok sandang sebesar 1,24%. Sedangkan empat kelompok pengeluaran lainnya masih menunjukkan kenaikan harga, yaitu kelompok perumahan, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan kelompok transportasi dan

komunikasi.

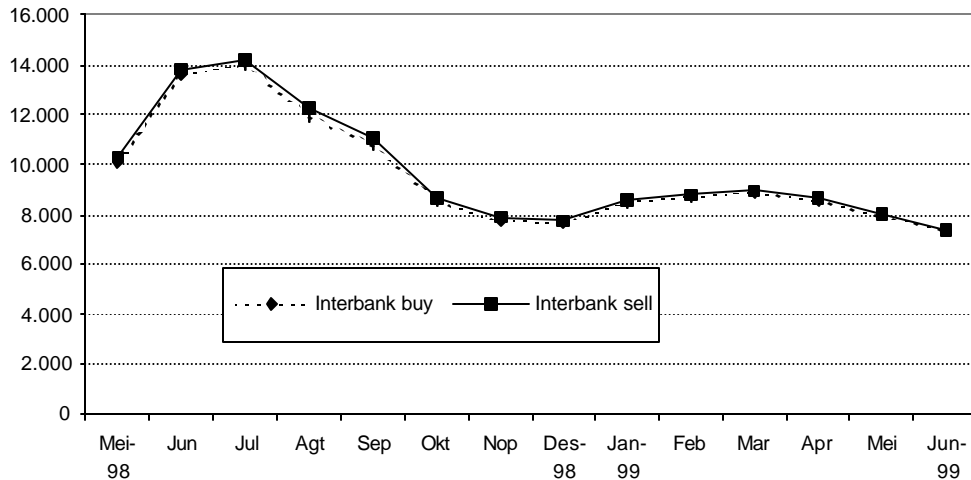
I.2 Perkembangan Moneter

Sampai dengan awal Juli 1999, kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang ditandai oleh inflasi negatif selama empat bulan berturut-turut sejak bulan Maret 1999, menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya suku bunga.

a. Nilai Tukar

Rata-rata nilai tukar rupiah (kurs spot antar bank) terhadap dolar Amerika pada bulan Juni 1999 mencapai Rp7.339/USD, atau menguat 636 poin dibandingkan dengan rata-rata bulan sebelumnya sebesar Rp7.975/USD.

Gambar 2
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (Mei 1998 – Juni 1999)



Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

Nilai tukar terkuat selama bulan Juni terjadi pada tanggal 28 Juni 1999, yaitu pada kurs Rp6.640/USD. Sedangkan nilai tukar terlemah terjadi pada tanggal 3 Juni 1999 pada kurs Rp8.170/USD. Sementara itu pada awal bulan Juli 1999 (sampai dengan tanggal 5 Juli 1999), rata-rata nilai tukar rupiah di pasar spot antar bank adalah Rp7.188/USD.

b. Perkembangan Uang Primer, M1, dan M2

Sampai dengan tanggal 30 Juni 1999, jumlah uang primer mencapai Rp77,35 triliun atau meningkat Rp1,01 triliun dari bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah uang primer ini tercermin pada meningkatnya uang kertas dan logam yang diedarkan serta saldo giro pada Bank Indonesia, masing-masing sebesar Rp0,14 triliun dan Rp0,89 triliun. Sedangkan giro sektor swasta mengalami penurunan sebesar Rp 0,02 triliun. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, kenaikan uang primer pada periode tersebut antara lain disebabkan oleh adanya ekspansi kredit likuiditas.

Sementara itu, sampai dengan akhir bulan Mei 1999, jumlah uang beredar (M1) mencapai Rp 103,30 triliun, naik Rp 2,59 triliun (2,6%) dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya uang giral sebesar Rp2,61 triliun sedangkan uang kartal mengalami penurunan sebesar Rp0,02 triliun.

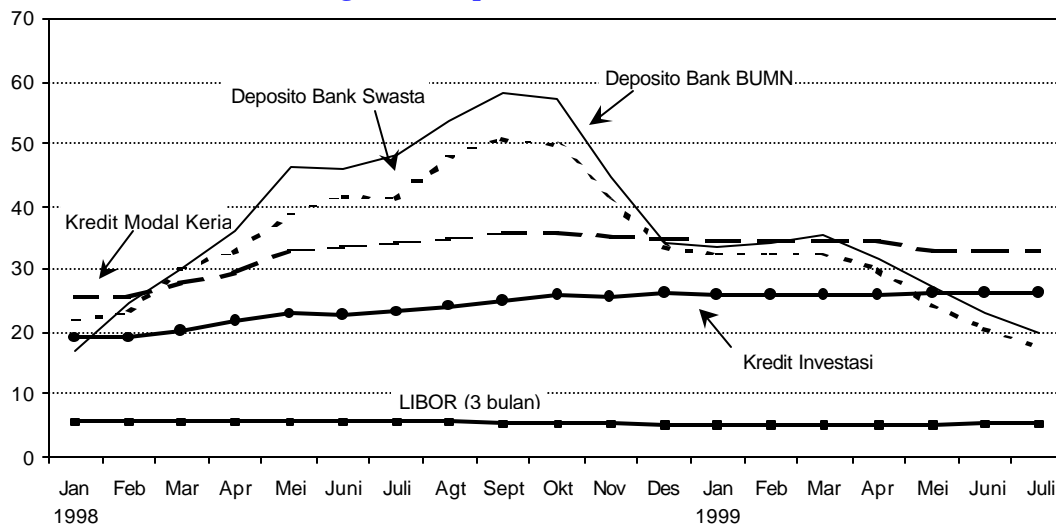
Uang kuasi pada akhir bulan Mei 1999 mengalami peningkatan sebesar Rp12,53 triliun (2,4%) dari bulan sebelumnya sehingga menjadi Rp524,96 triliun. Peningkatan jumlah uang beredar sebesar Rp2,59 triliun dan uang kuasi sebesar Rp12,53 triliun tersebut, menyebabkan likuiditas perekonomian (M2) mengalami peningkatan sebesar Rp15,12 triliun, sehingga posisinya pada Mei 1999 mencapai Rp628,26 triliun atau naik 2,5% dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp613,14 triliun.

c. Suku Bunga

Seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan berkurangnya tekanan inflasi, suku bunga SBI jangka waktu satu bulan, suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB/ON), dan suku bunga deposito dalam tiga bulan terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia bahwa suku bunga SBI pada akhir tahun 1999 akan mencapai 17 – 20%.

Pada awal bulan Juli 1999 (per 7 Juli 1999), suku bunga SBI jangka waktu satu bulan, kembali mengalami penurunan menjadi 17,15% dibandingkan minggu sebelumnya sebesar 18,84%. Tingkat bunga antar bank juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang BI, rata-rata bunga overnight per 7 Juli 1999 adalah sebesar 15,69%, turun dibandingkan hari sebelumnya (15,94%). Demikian pula suku bunga deposito baik bank pemerintah maupun bank swasta berjangka waktu 3 bulan masing-masing turun 2,95 poin persentase dan 3,12 poin persentase, sehingga masing-masing menjadi 20,00% dan 17,52%. Perkembangan suku bunga di dalam negeri dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3
Suku Bunga SBI, Deposito, dan LIBOR 1997-1999



Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

Keterangan: Bulan Juni sampai September 1998 penjualan SBI (3 bulan) sementara dihentikan

Penurunan suku bunga SBI ini sejalan dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia untuk

melanjutkan pelonggaran likuiditas secara berhati-hati sesuai dengan target-target moneter yang telah ditetapkan. Membaiknya kondisi moneter ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif pada proses pemulihan perekonomian nasional secara berkesinambungan.

d. Cadangan Devisa

Posisi Cadangan Devisa Bruto Bank Indonesia per 30 Juni 1999 meningkat sebesar USD929,8 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Mei 1999 sebesar USD25.967,3 juta sehingga mencapai USD26.897,1 juta. Sementara itu posisi Cadangan Devisa Bersih yang merupakan posisi Cadangan Devisa Bruto dikurangi Kewajiban Luar Negeri Bruto sebesar USD9.639,2 juta dan Giro Valas Bank Umum pada Bank Indonesia sebesar USD843,7 juta serta ditambah Net Forward Position sebesar USD0 menghasilkan posisi sebesar USD16.414,2 juta atau setara Rp123,1 triliun. Dibandingkan dengan posisi cadangan devisa bersih bulan sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp3,6 triliun. Peningkatan cadangan devisa bersih ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari ekspor migas dan reimbursement pinjaman luar negeri. Posisi cadangan devisa bersih sebesar USD16.414,2 juta tersebut masih berada di atas NIR yang ditargetkan dalam letter of intent sebesar USD15,2 miliar.

I.3 Perkembangan APBN 1999/2000

Beberapa pokok kebijaksanaan yang mendasari penyusunan APBN 1999/2000 adalah sebagai berikut:

1. Jaring Pengaman Sosial (JPS) tetap merupakan prioritas utama anggaran pembangunan 1999/2000.
2. DIP/Dokumen yang dipersamakan TA 1998/1999 untuk program-program JPS diperpanjang masa berlakunya sampai dengan akhir Juni 1999 untuk mengamankan kesinambungan pelaksanaan JPS.
3. Peranan daerah ditingkatkan dengan:
 - Meningkatkan porsi anggaran pembangunan yang didaerahkan;
 - Melimpahkan berbagai kegiatan yang terpusat ke daerah;
 - Menyerahkan pemrosesan DIP/Dokumen yang dipersamakan sejauh mungkin kepada daerah;
 - Memasukkan faktor sumbangan sumber alam yang tak terbarukan (non-renewable) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perhitungan alokasi pendanaan (block grants) untuk daerah;
 - Memadukan berbagai bantuan Inpres menjadi dana pembangunan daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan desa);
 - Memadukan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan krisis menjadi Program Perluasan JPS dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan pembangunan.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 pelaksanaan APBN tahun anggaran 1999/2000 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

- (1) Realisasi penerimaan negara mencapai Rp53.012,6 miliar atau 24,1% dari APBN tahun anggaran 1999/2000, dengan perincian:
 - Realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp34.163,7 miliar atau 24,0% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000, terdiri dari penerimaan migas sebesar Rp4.274,2 miliar atau 20,4% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000 dan

penerimaan nonmigas sebesar Rp29.889,5 miliar atau 24,7% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000.

- Realisasi penerimaan luar negeri mencapai Rp18.848,9 miliar atau 24,4% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000, terdiri dari penerimaan pinjaman program sebesar Rp15.128,2 miliar dan penerimaan pinjaman proyek sebesar Rp3.720,7 miliar.
- (2) Realisasi pengeluaran negara mencapai Rp38.198,3 miliar atau 17,4% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000, dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi pengeluaran rutin mencapai Rp27.029,8 miliar atau 19,7% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000.
 - Realisasi pengeluaran pembangunan mencapai Rp11.168,5 miliar atau 13,5% dari rencana dalam APBN 1999/2000, terdiri dari pembiayaan rupiah sebesar Rp 7.447,8 miliar atau 14,2% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000 dan bantuan proyek sebesar Rp3.720,7 miliar atau 12,4% dari rencana dalam APBN tahun anggaran 1999/2000.

Selengkapnya mengenai penerimaan maupun pengeluaran negara tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1
Penerimaan Negara, 1998/1999 – 1999/2000 (dalam miliar rupiah)

Jenis Penerimaan	1998/1999			1999/2000		
	APBN	Realisasi s.d 30/6/98	% Real. thd APBN	APBN	Realisasi s.d 30/6/99	% Real. thd APBN
A. Penerimaan Dalam Negeri	149.302,5	28.500,1	19,1	142.203,8	34.163,7	24,0
I. Minyak Bumi dan Gas Alam	49.711,4	6.830,9	13,7	20.965,0	3.274,2	20,4
1. Minyak Bumi	32.908,6	3.129,8	9,5	12.443,4	1.631,3	13,1
2. Gas alam	16.802,8	3.701,1	22,0	8.521,6	2.642,9	31,0
II. Di Luar Minyak Bumi dan Gas Alam	99.591,1	21.669,2	21,8	121.238,8	29.889,5	24,7
1. Pajak Penghasilan	25.846,2	11.144,0	43,1	40.626,0	15.375,7	37,8
2. Pajak Pertambahan Nilai	28.940,0	6.148,6	21,2	34.597,4	7.310,2	21,1
3. Pajak Bumi dan Bangunan	3.411,0	537,6	9,8	3.247,0	612,1	20,7
4. Pajak Lainnya	540,0	1.461,2	18,8	564,5	2.505,1	24,7
5. Bea Masuk	5.494,9	475,3	50,4	2.950,3	605,6	23,3
6. Cukai	7.755,9	445,0	13,0	10.160,0	617,0	19,0
7. Pajak Ekspor	942,8	96,7	17,9	2.594,5	113,6	20,1
8. Penerimaan Bukan Pajak	26.660,3	1.360,8	5,1	26.449,1	2.750,2	10,4
9. Laba Bersih Minyak	-	-	-	-	-	-
B. Penerimaan Pembangunan	114.585,6	4.255,3	3,7	77.400,0	18.848,9	24,4
I. Bantuan Program	74.044,7	-	-	47.400,0	15.128,2	31,9
II. Bantuan Proyek	40.540,9	4.255,3	10,5	30.000,0	3.720,7	12,4
J U M L A H	263.888,1	32.755,4	12,4	219.603,8	53.012,6	24,1

Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

Tabel 2
Pengeluaran Negara, 1998/1999 – 1999/2000 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	1998/1999			1999/2000		
	APBN	Realisasi s.d 30/6/98	% Real. thd APBN	APBN	Realisasi s.d 30/6/99	% Real. thd APBN
A. Pengeluaran Rutin	171.205,1	24.661,8	14,4	137.155,5	27.029,8	19,7
I. Belanja Pegawai	24.781,4	6.443,7	26,0	33.569,1	9.184,8	27,4
1. Gaji dan pensiun	19.120,0	5.277,9	27,6	26.824,9	7.889,4	29,4
2. Tunjangan beras	1.872,4	148,0	7,9	2.087,1	287,1	13,8
3. Uang makan/lauk pauk	1.484,4	365,7	24,6	2.106,9	794,6	37,7
4. Lain-lain belanja pegawai DN	1.154,6	455,0	39,4	1.489,9	163,3	11,0
5. Belanja pegawai LN	1.150,0	197,1	17,1	1.060,3	50,4	4,8
II. Belanja Barang	11.425,1	1.233,8	10,8	11.039,0	1.600,4	14,5
1. Belanja barang DN	10.059,7	1.219,9	12,1	10.006,8	1.501,8	15,0
2. Belanja barang LN	1.365,4	13,9	1,0	1.032,2	98,6	9,6
III. Subsidi Daerah Otonom	13.289,7	3.557,1	26,8	19.497,6	5.536,9	28,4
1. Belanja pegawai	12.606,5	3.402,9	27,0	18.696,8	5.364,1	28,7
2. Belanja non pegawai	683,2	154,2	22,6	800,8	172,8	21,6
IV. Bunga dan Cicilan Hutang	66.236,4	12.985,5	19,6	44.810,9	8.660,2	19,3
1. Dalam negeri	1.940,1	-	-	380,1	23,0	6,1
2. Luar negeri	64.296,3	12.985,5	20,2	44.430,8	8.637,2	19,4
IV. Pengeluaran Rutin Lainnya	55.472,5	441,7	0,8	28.238,9	2.074,5	7,3
1. Subsidi BBM	27.534,0	-	-	9.985,8	-	-
2. Lain-lain	27.938,5	441,7	1,6	18.253,1	2.074,5	11,2
B. Pengeluaran Pembangunan	90.338,9	5.977,4	6,4	82.448,3	11.168,5	13,5
I. Pembiayaan Rupiah	49.798,0	1.722,1	3,3	52.448,3	7.447,8	14,2
1. Departemen/Lembaga	14.397,0	548,3	3,8	14.022,5	660,5	4,7
a. Departemen/Lembaga	13.493,9	456,8	3,4	12.758,2	656,5	5,1
b. Hankam	903,1	91,5	8,2	1.264,3	4,0	0,3
2. Pembiayaan bagi daerah	13.806,3	1.129,1	8,2	16.129,3	980,8	6,1
3. Pembiayaan pemb. lainnya	21.594,7	44,7	0,2	22.296,5	5.806,5	26,0
a. Subsidi Bunga Kredit Program	3.957,6	0,2	0,0	3.701,0	-	-
b. Restrukturisasi Perbankan	15.000,0	-	-	17.000,0	5.125,4	30,1
c. Lain-lain	2.637,1	44,5	0,9	1.595,5	681,1	42,7
II. Bantuan Proyek	40.540,9	4.255,3	10,5	30.000,0	3.720,7	12,4
J U M L A H	261.544,0	30.639,1	11,6	219.603,8	38.198,3	17,4

Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

I.4 Perkiraan Perkembangan Moneter dan Keuangan Tahun 1999

Dengan terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya suku bunga serta munculnya tanda positif membaiknya kegiatan ekonomi akhir-akhir ini, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan akan terus menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan dalam tahun 1999 produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh pada kisaran -2% hingga 0%. Untuk tahun fiskal 1999/2000 laju pertumbuhan PDB diperkirakan akan menunjukkan angka positif.

Hingga akhir tahun 1999 tekanan inflasi diperkirakan masih akan tetap rendah. Secara tahunan laju inflasi diperkirakan akan mencapai kisaran 10% hingga 13%. Perkembangan berbagai faktor baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran belum menunjukkan indikasi terjadinya ketidakseimbangan yang dapat meningkatkan tekanan-tekanan kenaikan harga. Dari sisi eksternal, hal tersebut didukung pula oleh perkiraan rendahnya laju inflasi dunia dan harga barang-barang impor yang cenderung menurun.

Perkembangan permintaan agregat diperkirakan masih relatif lemah sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan juga akan tetap rendah. Sumber pertumbuhan masih akan bertumpu pada konsumsi dan investasi pemerintah sehingga defisit fiskal diperkirakan akan mencapai 3,7% dari PDB. Sebaliknya kegiatan investasi sektor swasta diperkirakan baru akan sedikit meningkat setelah semester II tahun 1999. Sementara itu, permintaan luar negeri bersih diperkirakan memberikan sumbangan negatif terhadap pembentukan PDB. Hal ini sejalan dengan perkiraan masih lemahnya ekspor, khususnya non migas, sementara impor diperkirakan mulai meningkat.

Dari sisi penawaran, tekanan inflasi masih akan rendah. Hal ini berkaitan dengan perkiraan meningkatnya pasokan yang berasal dari produksi pertanian dan perbaikan jaringan distribusi serta masih rendahnya pemanfaatan kapasitas produksi. Tekanan inflasi dari sisi penawaran juga belum mengkhawatirkan mengingat masih rendahnya pemanfaatan kapasitas produksi meskipun diperkirakan akan meningkat terutama mulai kuartal akhir 1999. Hal ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana proses pemulihan akses pembiayaan dari sektor perbankan dan restrukturisasi keuangan dunia usaha.

Perkembangan di sisi eksternal diperkirakan tidak banyak memberikan tekanan terhadap perkembangan harga-harga di dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan situasi ekonomi moneter internasional yang cenderung membaik, seperti tercermin pada pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan meningkat dengan tekanan inflasi yang relatif rendah. Perkembangan pasar keuangan dunia juga diperkirakan relatif stabil dan suku bunga cenderung menurun.

Berdasarkan perkembangan positif di atas, arah kebijakan moneter untuk bulan-bulan mendatang adalah pelonggaran likuiditas secara berhati-hati dengan tetap memperhatikan target moneter yang telah ditetapkan. Dengan memperkirakan laju inflasi tahun 1999 sekitar 10 – 13% dan ruang untuk melonggarkan besaran moneter hingga akhir tahun, maka suku bunga SBI diperkirakan akan cenderung menurun hingga pada akhir tahun 1999 mencapai sekitar 17 – 20%. Kehati-hatian tersebut di atas perlu dilakukan mengingat masih adanya unsur ketidakpastian pasca pemilu tanggal 7 Juni 1999 serta adanya kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve Board Amerika Serikat.

Kecenderungan penurunan suku bunga diharapkan dapat mendukung pula upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mempercepat penyehatan perbankan. Di samping dapat meringankan beban *negative spread* perbankan, penurunan suku bunga ini diharapkan dapat mendukung penanganan kredit bermasalah dan keberhasilan program restrukturisasi perbankan. Selain itu, penurunan suku bunga tersebut diharapkan juga akan mempermudah dan memperlancar proses penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta yang sudah mulai menunjukkan perkembangan positif akhir-akhir ini. Dengan demikian berbagai langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu sinergi yang dapat mendukung pemulihan perekonomian nasional di masa yang akan datang.

II. EKONOMI RAKYAT & PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

II.1. Ekonomi Rakyat

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan BUMN. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

Di samping pembinaan profesionalisme salah satu dukungan yang sangat diperlukan oleh pengusaha kecil, menengah dan koperasi adalah penyediaan kebutuhan modal usaha guna mendorong pengembangan usaha dan investasi. Menyadari hal tersebut dengan berlandaskan pengembangan ekonomi rakyat dalam mengatasi krisis dan upaya pemulihan kegiatan ekonomi, pemerintah menyelenggarakan 17 skim kredit program (bersubsidi) yang meliputi kredit program untuk koperasi (Kredit Usaha Tani/KUT, Kredit kepada Koperasi dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya/KKPA), kredit program untuk usaha perkebunan, Kredit untuk Pemilikan Rumah (KPR), Kredit untuk Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit untuk Pengentasan Kemiskinan (KPTTG), Kredit untuk Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM). Realisasi bantuan modal usaha melalui skim kredit program tersebut di atas sampai dengan April 1999 telah melebihi nilai Rp14 triliun. Lebih dari 50% diserap oleh koperasi terutama Kredit Usaha Tani (Rp4,5 triliun) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (Rp2,1 triliun) penyerapan tersebut meningkat lebih dari sepuluh kali dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkesinambungan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38/1999 untuk membentuk P.T Permodalan Nasional Madani yang kegiatannya meliputi jasa pembiayaan dan manajemen, penyelenggaraan pemberian kredit sesuai program pemerintah serta kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Penyertaan modal negara pada P.T PNM saat pendiriannya adalah sebesar Rp300 miliar sebagai kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN 1998/1999.

II.2. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Dalam rangka penyelamatan, pemerintah sejak tahun 1997/1998 telah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program ini merupakan upaya yang bisa ditempuh melalui berbagai bidang intervensi maupun kegiatan agar masyarakat tidak semakin terpuruk, sehingga secara bertahap mampu mengangkat kondisi sosial ekonominya sendiri. Pengertian JPS ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu JPS krisis dan JPS kronis/klasik. JPS krisis adalah upaya menolong kelompok masyarakat miskin yang terpuruk akibat krisis ekonomi, sedangkan JPS kronis/klasik adalah program-program perlindungan masyarakat yang lebih bersifat jangka panjang.

Secara umum tujuan program JPS adalah untuk:

1. Memulihkan kecukupan pangan yang terjangkau oleh masyarakat miskin
2. Menciptakan kesempatan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan, dan daya beli masyarakat miskin
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
4. Memulihkan pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin
5. Memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.

Dalam realisasi kegiatannya, program JPS ditempuh melalui empat program atau bidang intervensi:

- a. Program ketahanan pangan, yang diarahkan untuk menjamin tersedianya bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus di daerah, Bappenas telah merancang agar diversifikasi konsumsi pangan diperhatikan dan disesuaikan dengan budaya dan karakteristik daerah.
- b. Program padat karya dan penciptaan lapangan kerja, yang diarahkan untuk memberi kesempatan kerja seluas mungkin dalam kegiatan ekonomi produktif. Pola padat karya ini dimaksudkan untuk menciptakan daya beli bagi mereka yang menganggur, sehingga membantu kemampuan mereka untuk membeli kebutuhan pokoknya, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong usaha produktif yang dapat berlanjut setelah program ini berakhir.
- c. Program perlindungan sosial, yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, antara lain ditempuh melalui bantuan pengadaan obat-obatan langsung ke setiap puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dalam bidang pendidikan, program diarahkan agar anak didik tidak perlu putus sekolah, sehingga dapat mempertahankan tingkat partisipasi pendidikan yang sudah dicapai. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bantuan langsung untuk meringankan biaya pendidikan, dari tingkat SD sampai SMU.
- d. Program pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Program ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan kembali kegiatan ekonomi rakyat, terutama untuk kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah, serta koperasi.

Di lapangan kegiatan ini meliputi Operasi Pasar Khusus, Dana Bantuan Operasional (DBO) untuk murid SD hingga SMU, beasiswa untuk SD hingga SMU, Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T), Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK), dan Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK), program Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), serta proyek Lembaga Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM).

a. Program Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui empat rancangan kegiatan, yaitu penyediaan cadangan pangan, bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus, intensifikasi produksi pangan, serta subsidi modal dan pupuk.

Operasi Pasar Khusus (OPK) sebagai salah satu kegiatan utama adalah kegiatan penyaluran bahan pangan pokok (beras) kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, dengan harga yang murah dan jumlah serta waktu yang telah ditentukan dalam rangka mencegah kondisi keluarga rawan pangan ke tingkat yang lebih parah. Untuk tahun 1999/2000, pemerintah telah memutuskan meneruskan program OPK Beras. Kelanjutan program OPK tahun 1999/2000 adalah sebagai upaya dalam mengatasi rawan pangan keluarga dalam rangka ketahanan pangan.

Terdapat beberapa penyesuaian yang mendasar dalam program OPK 1999/2000, yaitu *pertama*, keluarga sasaran penerima OPK adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi, Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi berdasarkan data BKKBN, yang ditetapkan Pemda setempat. *Kedua*, dikoordinasikan pemerintah daerah, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasannya dari titik distribusi sampai ke kelompok sasaran, dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang dipandang perlu seperti perguruan tinggi/LSM, maupun lembaga masyarakat lainnya. *Ketiga*, peningkatan pemantauan dan pelaporan. *Keempat*, mendukung kelancaran pelaksanaan OPK, diperlukan sosialisasi. *Kelima*, adanya perangkat dan mekanisme dalam rangka penyampaian dan penanganan keluhan.

Jumlah plafond keluarga penerima OPK tahun 1999/2000 diperkirakan sebesar 17,50 juta KK. Penetapan keluarga sasaran OPK beras merupakan tanggung jawab Pemda setempat dengan

mempertimbangkan saran dan pendapat berbagai pihak, sebagai hasil verifikasi dan validasi instansi terkait dan hasil musyawarah dengan masyarakat setempat sejak dari Tingkat Desa sampai dengan Kecamatan, Dati II dan Dati I sehingga benar-benar objektif. Selanjutnya apabila ada perubahan, maka revisi dari jumlah penerima OPK tersebut dimungkinkan untuk direvisi setiap tiga bulan. Sebagai acuan pelaksanaan OPK tahun 1999/2000 telah disiapkan Pedoman Umum oleh Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan juga Petunjuk Pelaksanaan oleh Badan Urusan Logistik. Selanjutnya masing-masing daerah, diharapkan segera mengeluarkan Petunjuk Teknis.

Untuk mengeliminasi terjadinya penyimpangan operasional OPK, dilakukan melalui penyebaran informasi di masyarakat serta aparat dan penyelenggaraan penanganan keluhan, dalam rangka penanganan daerah khusus, pemda setempat dapat mengusulkan kebijaksanaan khusus di daerah dan mengkoordinasikannya ke pusat untuk mendapat persetujuan.

Realisasi pelaksanaan OPK Beras TA 1998/1999 (periode Juni 1998 s/d Maret 1999) mencapai 1.054.898,7 ton beras. Sedangkan realisasi penyaluran beras pada TA 1999/2000 periode bulan April s/d Juli 1999 mencapai 487.970,3 ton.

Pelaksanaan Proyek Percontohan OPK-Swadaya Masyarakat (OPK-SM) telah dilaksanakan di 10 kelurahan oleh LSM PaRaM dan LSM Agrikarya di 2 kelurahan. Realisasi OPK-SM yang dilaksanakan oleh LSM PaRaM dalam periode mingguan hingga bulan Juni 1999 telah mencapai total penyaluran sebesar 454.485 kg untuk 19.441 KK pemegang kartu pangan. Dibandingkan dengan rencana alokasi sebesar 550.684 kg untuk 19.441 KK, maka realisasi tersebut telah mencapai 82,5% dari rencana.

Pelaksanaan proyek percontohan ini menggunakan bantuan 700 ton beras dari WFP dan berlangsung selama dua bulan (April dan Mei 1999). Dalam rangka transparansi maka proyek percontohan ini telah dievaluasi bersama oleh Tim yang terdiri dari WFP dan instansi terkait (Meneg. Pangan dan Hortikultura, Bulog dan Pemda DKI) pada bulan Juni. Direncanakan program OPK-SM akan diperluas di lima kota besar yaitu Jabotabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Penyediaan sumber beras berasal dari WFP sebesar 83.000 ton melayani \pm 500.000 KK rawan pangan dan rawan sosial diprioritaskan di daerah kumuh perkotaan.

Berbagai kegiatan di dalam Program Ketahanan Pangan ini dimaksudkan agar produksi pangan kembali meningkat, sehingga masyarakat dengan mudah dapat memperoleh kebutuhan dasarnya berupa bahan makanan dengan harga yang terjangkau.

b. Program Padat Karya dan Penciptaan Lapangan Kerja

Program padat karya dan penciptaan lapangan kerja ini dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang parah terutama sektor industri dan jasa (daerah urban) dan perdesaan yang gagal panen dengan penduduk miskin yang terpuruk akibat krisis ekonomi sebagai sasaran utamanya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar, mampu memelihara tingkat pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang meliputi:

- Program Padat Karya Khusus (padat karya kehutanan, P3T dan padat karya desa-kota atau PDK-MK). Realisasi penyerapan tenaga kerja (dalam HOK) telah mencapai 57,49 juta HOK atau sekitar 77,81 % dari target. Penyaluran dananya secara keseluruhan mencapai sekitar Rp. 787,65 milyar atau sekitar 66,6 % dari target.
- Program Padat Karya Sektor (Padat Karya Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan : PKPS, P3P, Suplemen, PDK-MK, PPK, P3DT). Realisasi sampai awal bulan Mei 1999 jumlah tenaga yang sudah terserap adalah 49,27 juta HOK atau 49,27 % dari yang ditargetkan. Sementara penyaluran dana telah mencapai sekitar Rp. 1,14 Triliun atau 69,90 % dari target.

- Program Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Secara keseluruhan realisasi pencairan dana BLM per desa yang telah diterima di 27 propinsi adalah sekitar 85,79 % dari total BLM (rata-rata nasional) atau sekitar Rp. 1.332.673.101.000.-

Pendekatan pelaksanaan program ini bervariasi, mulai dari yang top-down (padat karya ke-PU-an, padat karya desa kota, padat karya kehutanan, pelatihan tenaga terampil), sampai kepada yang didasarkan kepada kemampuan masyarakat bottom-up (P3DT, PPK, dan PDM-DKE).

Dalam PDM-DKE sistem alokasi dana dilakukan secara terbuka dengan menggunakan kriteria alokator jumlah penduduk miskin (jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I) dan penganggur di setiap kabupaten/kota berdasarkan data yang ada di BPS dan BKKBN. Cara yang sama dilakukan pula untuk alokasi bagi desa/kelurahan. Sedangkan di desa/kelurahan dikenali anggota masyarakat yang menjadi sasaran JPS, yaitu yang miskin tanpa sumber penghasilan atau yang sumber penghasilannya menurun drastis dan pengusaha kecil yang terpuruk. Keputusan masyarakat dilakukan dalam musyawarah desa/kelurahan anggota masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan.

Program PDM-DKE ini memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di perdesaan/kelurahan kota untuk memilih kegiatan yang paling tepat menurut keadaan desa dan kebutuhan masyarakatnya untuk membantu anggota masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di desa dapat membantu memelihara tingkat pendapatan yang memadai dan membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat miskin di pedesaan, sekaligus memelihara tingkat pelayanan sosial dan fisik pedesaan, seperti perbaikan saluran air kotor, penyediaan air bersih, peningkatan jalan desa, dan adukungan modal baru untuk yang putus usaha.

Pilihan kegiatan dan jenis usaha serta sasaran atau target group ditentukan secara musyawarah oleh kelompok penduduk desa yang terorganisir melalui lembaga masyarakat di desa, misalnya LKMD. Mereka dibantu oleh fasilitator di desa/kelurahan menurut pilihan mereka, dan fasilitator di kecamatan dan konsultan manajemen di kabupaten/kotamadya yang dipulih oleh Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota. Dalam PDM-DKE, pemerintah desa (Lurah) dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pendukung saja.

Program yang mirip PDM-DKE adalah program P3DT dan PPK yang direncanakan bukan untuk periode penyelamatan saja tetapi lebih bersifat jangka panjang dan oleh karena itu lebih rumit rancangannya.

Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan di dalam program ini, maka diharapkan kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan meningkat, roda perekonomian rakyat kembali bergerak, dan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi meningkat.

c. Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial ditujukan untuk memelihara pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin yang terpuruk karena dampak krisis ekonomi.

Dengan program ini, dampak krisis ekonomi yang sangat terasa dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah dan obat-obatan sehingga tidak terjangkau oleh banyak keluarga miskin dapat dikurangi. Kegiatan dalam program perlindungan sosial meliputi:

- Subsidi untuk obat-obatan dan beberapa peralatan medis yang diimpor agar harganya terjangkau oleh masyarakat
- Pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO)
- Pemberian beasiswa dan makanan tambahan anak sekolah
- Pelayanan kesehatan gratis dan makanan tambahan gratis bagi ibu dan anak balita.

Beasiswa dan makanan tambahan diberikan kepada anak sekolah. Mereka juga dibebaskan dari uang sekolah dan segala pembayaran sekolah. Di samping itu disediakan pula bantuan untuk panti asuhan dan anak jalanan. Pada tahun 1998/1999 jumlah murid SD yang menerima beasiswa sebanyak 4,3 juta murid mulai dari SD sampai universitas. DBO diberikan kepada lebih dari 131 Ribu sekolah dan universitas di seluruh Indonesia atau sekitar 60 % dari jumlah sekolah.

Secara keseluruhan realisasi penyerapan beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) adalah Rp. 365.517.023.712,- (Tahap I) dan Rp. 158.102.961.000,- (Tahap II) serta Rp. 4.603.245.000,- (Tahap III dan IV).

Untuk ibu dan anak balita dari keluarga miskin yang terpuruk diberikan pengobatan gratis dan tambahan gizi di Puskesmas. Sementara itu seluruh anggota keluarga miskin mendapat kartu sehat untuk berobat gratis di Puskesmas.

Makanan tambahan diberikan kepada bayi dan balita yang saat ini berjumlah 2,4 juta jiwa. Setiap bayi dan anak mendapat 100 gram makanan dan diberikan 34 kali sehari selama 90 hari. Makanan tambahan untuk balita usia 25-60 bulan (4,2 juta jiwa) yang berasal dari keluarga miskin memerlukan Rp.306,8 miliar.

Dengan program ini diharapkan *drop-out* dari anak-anak keluarga miskin yang terpuruk karena kesulitan ekonomi dan kekurangan gizi tidak terjadi, biaya pelayanan kesehatan lebih terjangkau, derajat kesehatan masyarakat miskin dapat ditingkatkan.

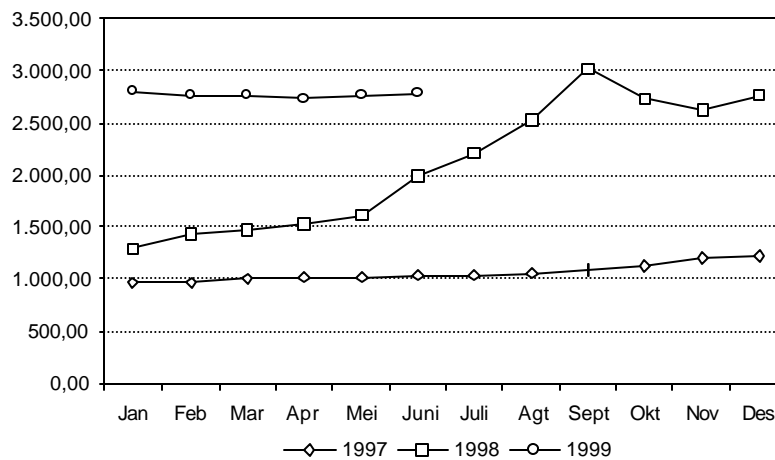
III. PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGADAAN BAHAN POKOK PANGAN

III.1. Beras

Harga rata-rata beras medium secara nasional pada bulan Juni 1999 adalah sebesar Rp2.784,67/kg atau naik 0,30% dibanding dengan harga pada bulan Mei 1999 yang tercatat sebesar sebesar Rp2.771,18/kg. Harga rata-rata tertimbangnaik 0,58% atau Rp17,08/kg menjadi Rp2.956,08/kg. Harga rata-rata beras tertinggi tercatat di kota Jayapura sebesar Rp3.500,-/kg dan terendah di kota Banda Aceh yakni sebesar Rp2.350,-/kg. Kontribusi beras terhadap inflasi pada bulan Juni 1999 adalah 0,0318%.

Gambar 4

Perkembangan harga Eceran Beras Medium di Indonesia Tahun 1996/97 – 1998/99



Sumber : Laporan Menperindag Pada Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

Pengadaan beras dalam negeri oleh BULOG pada bulan Juni 1999 adalah sebanyak 243.048 ton setara beras, sehingga secara kumulatif pengadaan beras dalam negeri selama periode Januari - Juni 1999 adalah 1.502.253 ton setara beras. Pengadaan beras ex luar negeri (impor) oleh BULOG pada bulan Juni 1999 diperkirakan sekitar 230.000 ton.

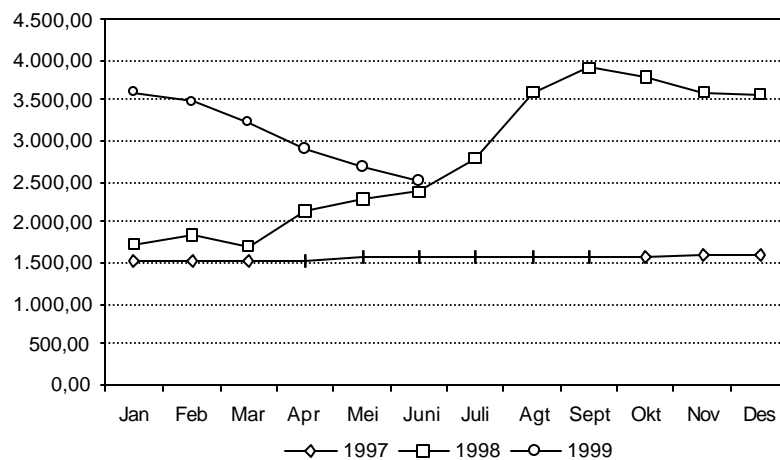
Realisasi penyaluran beras pada bulan Juni 1999 adalah sebesar 292.524 ton. Penyaluran beras dalam Operasi Pasar Khusus (OP Khusus) pada bulan Juni 1999 menurut data sementara dari 18 (delapan belas) propinsi sebanyak 115.969 ton untuk 5,9 juta kepala keluarga. Pada bulan Mei 1999 jumlah kepala keluarga yang terjangkau OP Khusus adalah 9,12 juta KK dengan volume beras yang didistribusikan sebanyak 182.375,2 ton.

III. 2. GULA PASIR

Harga rata-rata gula pasir secara nasional pada bulan Juni 1999 adalah Rp2.523,73/kg atau turun 5,38% (Rp143,55) dibanding dengan harga pada bulan Mei 1999. Harga rata-rata tertinggi terjadi di Dili dan Jayapura yakni sebesar Rp3.420,-/kg atau dibandingkan bulan sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 2,29% di Dili dan kenaikan sebesar 10,32% di Jayapura. Harga terendah terjadi di kota Medan yakni sebesar Rp2.154,-/kg atau turun 5,94% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan harga rata-rata gula pasir memberikan sumbangan terhadap inflasi bulan Mei 1999 sebesar -0,0501%.

Gambar 5

Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir di Indonesia Tahun 1997 – 1999



Sumber : Laporan Menperindag Pada Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

Sesuai dengan Keppres RI No. 19/1998 BULOG tidak lagi melaksanakan pengadaan gula pasir, sedangkan untuk penyalurannya masih dilakukan untuk menghabiskan sisa stok yang masih ada. Pengadaan melalui impor hanya dilakukan selama periode Januari – Februari 1999 sebanyak 98.500 ton. Sedangkan realisasi penyaluran pada bulan Juni 1999 adalah 60.845 ton, terdiri dari gula ex dalam negeri sebanyak 20.723 ton dan ex luar negeri sebanyak 40.122 ton. Realisasi penyaluran selama periode Januari – Juni 1999 sebanyak 225.124 ton terdiri dari 126.567 ton ex impor dan 98.557 ton ex dalam negeri. Stok gula pasir di gedung BULOG pada akhir bulan Juni 1999 mencapai sekitar 785.187 ton.

Sejak tanggal 1 Februari 1998 impor gula pasir dibebaskan sehingga dapat dilakukan oleh importer umum (IU) dengan Bea Masuk 0 %. Subsidi gula pasir dilakukan sejak tanggal 2 September 1998. Hal ini menyebabkan harga di dalam negeri terus mengalami penurunan, karena

dibanjiri oleh impor (swasta tertarik melakukan impor). Penurunan harga ini kurang menguntungkan bagi petani tebu.

Pada tanggal 21 Januari 1998 dikeluarkan INPRES 5/1998 yang mencabut INPRES 5/1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat. Tujuan dari dikeluarkannya INPRES 5/1998 adalah agar para petani dapat menentukan sendiri jenis tanaman yang dianggap paling menguntungkan untuk dibudidayakan dan mendorong agar pabrik-pabrik gula merestrukturisasi kegiatan usahanya.

Karena kurangnya sosialisasi mengenai INPRES 5/1998 tersebut, maka para petani tetap menanam tebu yang pada bulan Mei 1999 mulai panen untuk digilingkan ke pabrik-pabrik gula. Penanaman tebu ini sebenarnya kurang menguntungkan karena harga gula impor lebih rendah. Karena itu sejak tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah memutuskan untuk menanggung selisih harga pembelian pabrik gula dari petani dengan harga pengadaan gula impor yang lebih rendah. Kebijakan untuk membantu petani tebu ini hanya berlaku pada musim giling tahun 1999, sementara tata niaga gula berlaku seperti semula.

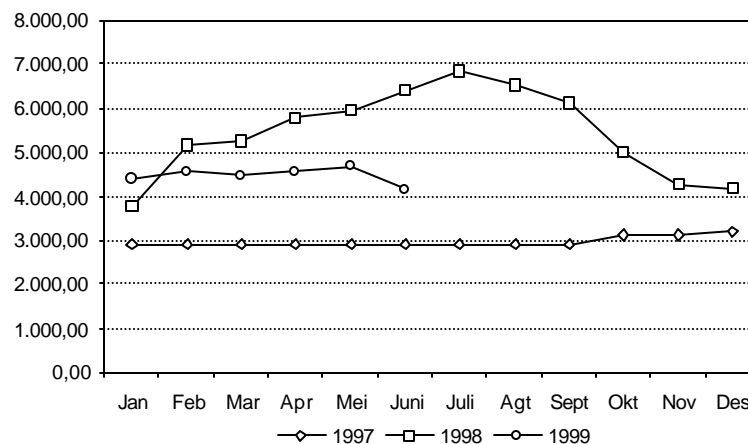
Dengan kebijaksanaan ini Pemerintah menanggung harga maksimum Rp2.500,- per kilogram yang dibayar pabrik gula kepada pabrik tebu, sehingga petani masih akan memperoleh keuntungan sekitar 10 persen. Harga ini diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dengan Dewan Gula Indonesia.

III. 3. MINYAK GORENG SAWIT

Harga rata-rata minyak goreng curah eks sawit secara nasional pada bulan Juni 1999 adalah Rp4.144,26/kg yang berarti turun 11,58% (Rp542,56) dibanding dengan harga pada bulan Mei 1999. Harga rata-rata tertinggi terjadi di kota Dili yakni Rp7.028,11/kg dan terendah tercatat di Palu yakni Rp2.598,60/kg. Penurunan harga rata-rata tersebut memberikan sumbangan terhadap inflasi bulan Mei 1999 sebesar -0,1122%.

Gambar 6

Perkembangan Harga Eceran Minyak Goreng di Indonesia Tahun 1997 – 1999



Sumber : Laporan Menperindag Pada Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

III. 4. TEPUNG TERIGU

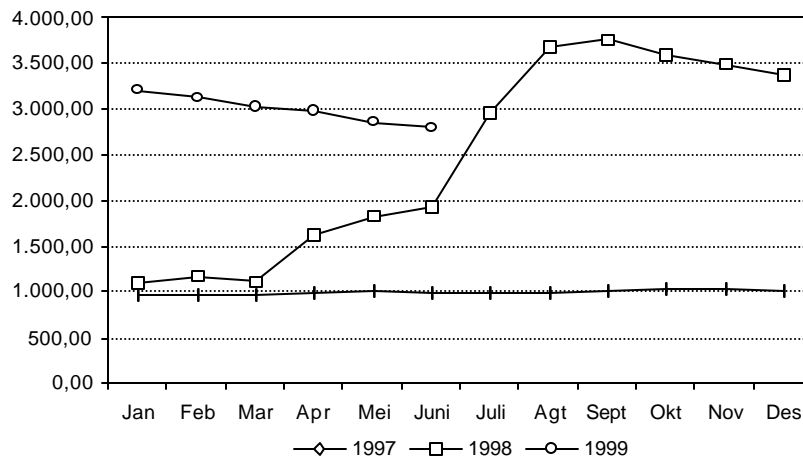
Harga rata-rata tepung terigu secara nasional pada bulan Juni 1999 adalah Rp2.792,10/kg atau turun 2,04% (Rp58,24) dibanding dengan harga pada bulan Mei 1999. Harga tertinggi

tercatat di kota Jayapura yakni Rp3.500,-/kg atau naik 1,20% dibanding dengan harga pada bulan sebelumnya. Harga terendah terjadi di Yogyakarta yakni sebesar Rp2.506,67/kg yang turun 1,38% dibanding dengan harga bulan sebelumnya. Penurunan harga rata-rata tepung terigu memberikan sumbangan terhadap inflasi bulan Juni 1999 sebesar -0,0007%.

Berdasarkan data sementara, pengadaan tepung terigu pada bulan Juni 1999 diperkirakan mencapai 70.000 ton. Secara kumulatif pengadaan selama periode Januari – Juni 1999 diperkirakan sebanyak 362.692 ton. Penyaluran dalam bulan Juni 1999 untuk sementara tercatat 13.354 ton, sehingga penyaluran selama periode Januari – Juni 1999 diperkirakan sebanyak 352.635 ton. Stok pada akhir bulan Juni 1999 mencapai sekitar 80.043 ton.

Gambar 7

Perkembangan Harga Eceran Tepung Terigu di Indonesia Tahun 1997 – 1999



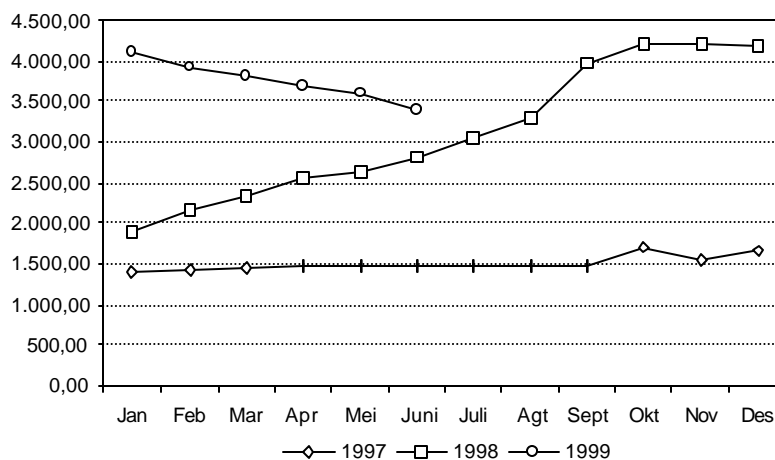
Sumber : Laporan Menperindag Pada Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

III. 5. KEDELAI

Harga kedelai rata-rata secara nasional pada bulan Juni 1999 adalah Rp3.397,67/kg atau turun 5,78% (Rp208,47) dibanding dengan harga pada bulan sebelumnya. Harga tertinggi terjadi di kota Medan dan Palu sebesar Rp5.000,-/kg, sama dengan harga pada bulan sebelumnya. Sedangkan harga terendah terjadi di kota Semarang yakni sebesar Rp 2.000,-/kg.

Gambar 8

Perkembangan Harga Eceran Kedelai di Indonesia Tahun 1997 – 1999



Sumber : Laporan Menperindag Pada Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

Seperti halnya gula pasir dan tepung terigu, sejak dikeluarkannya Keppres RI No. 19/1998 tentang Tugas Pokok BULOG, maka BULOG tidak lagi melaksanakan pengadaan kedelai. Untuk menghabiskan stok kedelai yang masih ada, BULOG masih melakukan penyalurannya. Realisasi penyaluran kedelai pada bulan Juni 1999 adalah sebanyak 1.717 ton merupakan penyaluran melalui KOPTI sebanyak 1.617 ton serta SATGAS dan untuk industri sebanyak 100 ton. Secara kumulatif penyaluran selama periode Januari – Juni 1999 telah disalurkan sebanyak 103.735 ton yang antara lain melalui SATGAS dan untuk industri sebanyak 27.330 ton dan KOPTI sebanyak 76.405 ton. Stok pada akhir Juni 1999 mencapai sekitar 96.318 ton.

IV. REFORMASI SEKTOR PERBANKAN DAN RESTRUKTURISASI HUTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA

IV.1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Pelaksanaan penyehatan kondisi perbankan secara komprehensif memperoleh prioritas yang tinggi dalam proses restrukturisasi perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan prasyarat yang penting bagi pulihnya dunia usaha. Untuk itulah dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertujuan untuk menanggulangi kesulitan keuangan pada bank-bank yang lemah dan memantapkan dengan cepat berfungsinya sistem perbankan yang sehat.

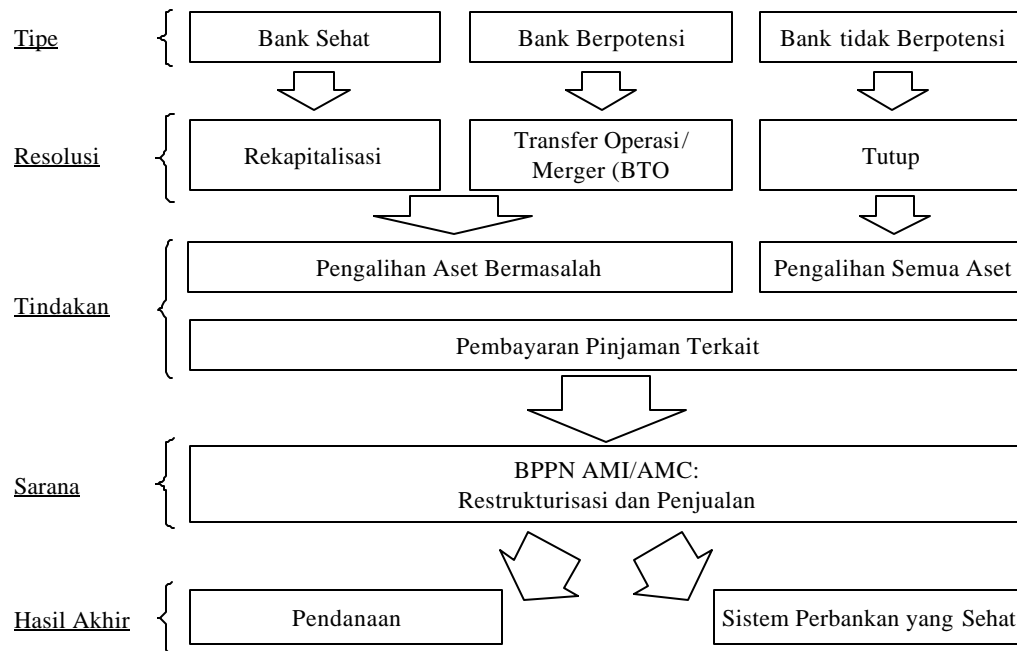
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 27/1998, BPPN dibentuk sebagai lembaga yang independen dalam rangka pemulihan perbankan nasional, dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peran BPPN meliputi usaha-usaha pengembalian sektor perbankan Indonesia kepada tingkat yang sehat dengan tugas utama memelihara dan mengatur sektor ini untuk mencapai standar operasi perbankan internasional. Pembentukan BPPN terutama didasarkan kepada perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan sektor perbankan nasional serta mengantisipasi krisis moneter yang terjadi di pertengahan tahun 1997. Pembentukan BPPN sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjamin keamanan uang nasabah yang ada di bank, karena jaminan pemerintah tersebut juga meliputi nasabah bank-bank yang berada di bawah pengelolaan BPPN.

Untuk pemulihan kembali perbankan nasional dan membangun stabilitas serta kekuatan ekonomi jangka panjang yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro BPPN menetapkan tiga strategi sebagai berikut:

www.ginandjar.com

- Untuk menjalankan program normalisasi perbankan, dilakukan upaya identifikasi, pengawasan dan pemulihan kondisi bank-bank yang mungkin mengganggu keamanan dan stabilitas sistem keuangan
- Mengawasi jalannya program jaminan pemerintah atas dana nasabah
- Membentuk Perusahaan Pengelola Aset (Asset Management Company) untuk menyelesaikan kredit bermasalah

Gambar 9
Resolusi dan Kerangka Kerja BPPN



Sumber: BPPN

Saat ini reformasi sektor perbankan telah masuk ke suatu tahap yang menentukan. Strategi untuk mencapai penyelesaian keseluruhan bagi sektor perbankan telah disusun. 7 (tujuh) bank telah direkapitalisasi, 4 (empat) bank pemerintah dimerger, 12 (dua belas) bank diambil alih, dan 66 bank dibekukan operasinya. Mengenai aset bank, AMC telah menerima transfer dari 28 institusi yang jumlahnya mencapai Rp180 triliun. Penjualan aset bank pertama telah dilaksanakan berupa tagihan kartu kredit Bank Papan Sejahtera. Penjualan non-core aset mencapai Rp133 miliar.

Pada tanggal 8 Juli 1999, BPPN telah membentuk lima perusahaan induk (holding company) untuk menampung berbagai perusahaan dan aset yang telah dialihkan pemegang saham utama bank-bank BBO dan BTO kepada pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan memudahkan restrukturisasi perusahaan. Jumlah perusahaan yang sudah dan akan dialihkan ke dalam perusahaan induk berjumlah 215 perusahaan dari berbagai industri dengan nilai perusahaan mencapai USD10,4 miliar.

IV.2. Restrukturisasi Hutang Luar Negeri Perusahaan Swasta

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan dengan demikian mengurangi kemiskinan, pemerintah sangat berkepentingan untuk mempercepat pemulihan sektor riil untuk

membantu penyehatan kembali sektor perbankan dan keuangan, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi perekonomian nasional.

Salah satu unsur penting dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional adalah melalui suatu wahana di mana perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi masalah bersepakat dengan para kreditor untuk melakukan restrukturisasi, baik terhadap perusahaan maupun hutang mereka, sehingga perusahaan tersebut memperoleh kembali akses untuk mendapatkan modal kerja serta penyeteroran modal baru. Dengan demikian perusahaan swasta dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan meningkatkan kesepakatan kerja, serta menciptakan sumber penerimaan pajak bagi perekonomian nasional.

Restrukturisasi keuangan dunia usaha sangat penting bagi penyelamatan ekonomi, dan terkait erat dengan program restrukturisasi sistem perbankan. Dengan perkataan lain, dunia usaha yang sehat perlu bagi sektor perbankan yang sehat. Skim yang disepakati di Frankfurt menyediakan suatu kerangka bagi restrukturisasi utang swasta kepada bank-bank asing secara sukarela melalui *Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*, dengan persyaratan yang konsisten dengan kemampuan pembayaran eksternal yang menyeluruh, dan diharapkan akan memulihkan arus dana pada dunia usaha dalam negeri.

a. Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)

INDRA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan Keppres No. 95/1998, lembaga ini merupakan lembaga non-profit yang terpisah dari Bank Indonesia namun beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia. INDRA bersedia mengambil alih resiko nilai tukar (*exchange rate risk*) namun tidak menanggung segala macam resiko komersial (*commercial risk*) dan tidak pula mengambil alih hutang perusahaan Indonesia tersebut. Tujuan INDRA adalah mendukung proses penyelesaian hutang luar negeri perusahaan swasta Indonesia melalui restrukturisasi. Program INDRA bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi para debitur dalam mengembalikan pinjaman-pinjaman luar negeri, terutama selama masa krisis ekonomi ini. Diharapkan dengan adanya penyelesaian hutang luar negeri valas melalui program INDRA ini, permintaan USD dalam jangka pendek akan berkurang, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran serta nilai tukar rupiah.

INDRA pada dasarnya hanya berfungsi sebagai lembaga (perantara) intermediary dan sekaligus menyediakan skema atau kerangka kerja bagi penyelesaian utang luar negeri yang feasible dan manageable. Berdasarkan konsep penyelesaian utang luar negeri melalui INDRA, utang perusahaan swasta akan direstruktur menjadi pinjaman dalam rupiah yang akan dibayar oleh perusahaan swasta (debitur) dalam jangka waktu minimal 8 tahun. Untuk upaya restrukturisasi sesuai dengan skim INDRA, perusahaan swasta (debitur) harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan kreditor.

Bagi para debitur yang mengalami kesulitan pengadaan valas untuk mengembalikan hutang luar negeri di saat krisis ekonomi ini, program INDRA memberikan beberapa alternatif yang sangat membantu. Pertama, program ini menghilangkan resiko ketidakstabilan kurs atau nilai tukar dan secara bersamaan memberikan nilai tukar terbaik. Kedua, debitur akan diringankan dengan jangka waktu pembayaran hutang yang diperpanjang menjadi minimal delapan tahun. Ketiga, debitur akan menerima suku bunga yang menarik sebesar 5,5% secara riil. Perhitungan yang digunakan pun menggunakan metode *balooning* di mana debitur membayar angsuran pokok dan bunga kecil di awal dan membesar di kemudian hari. Mekanisme yang tidak seperti lazimnya ini memberikan ruang gerak bagi perusahaan yang mendapat kesulitan *cash flow* dalam jangka pendek.

Pada bulan Juli 1999, INDRA menawarkan *buy-down option* kepada para debitur yang menginginkan nilai tukar sebesar 10% atau 20% lebih rendah dari *best exchange rate*. Namun, sebagai kompensasinya suku bunga dinaikkan 2,89% atau 6,36% lebih tinggi daripada 5,5% riil per tahun. Pilihan ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi laporan keuangan perusahaan.

b. Prakarsa Jakarta/Jakarta Initiative

Dalam proses INDRA, debitur hanya dapat mengikuti skim yang disediakan oleh INDRA setelah proses restrukturisasi hutang selesai. Sedangkan proses restrukturisasi itu sendiri terjadi di luar INDRA. Karena proses ini tidak mudah antara lain karena kurangnya keahlian pihak debitur dalam melakukan negosiasi maka diperlukan pihak lain (dalam hal ini Prakarsa Jakarta/Jakarta Initiative) yang dapat menjembatani dan mempercepat proses negosiasi itu sendiri. Bantuan teknis Prakarsa Jakarta juga termasuk melakukan restrukturisasi perusahaan, termasuk bantuan teknis dalam aspek hukum, perpajakan, finansial dan lainnya.

Kemajuan lebih jauh dalam melakukan restrukturisasi perusahaan swasta telah dicapai dalam pelaksanaan Prakarsa Jakarta. Sampai dengan tanggal 7 Juli 1999, telah 7.234 perusahaan meminta bantuan dari Satgas Prakarsa Jakarta dengan jumlah hutang luar negeri sekitar USD24 miliar. Dalam kerangka Prakarsa Jakarta, telah tercapai 22 kesepakatan dengan para kreditor, yang mencakup hutang dalam USD 3 miliar.

Dengan adanya restrukturisasi hutang-hutang luar negeri yang pembayarannya diperpanjang menjadi minimal delapan tahun, maka tekanan terhadap neraca pembayaran berkurang dan nilai tukar rupiah terhadap USD menjadi lebih stabil. Dengan demikian reformasi ekonomi dapat lebih cepat terlaksana bila nilai tukar telah stabil kembali.

V. REFORMASI BUMN

BUMN sebagai satu penggerak utama perekonomian Indonesia saat ini diharapkan dapat memberikan peran yang besar, di tengah menurunnya peran swasta dalam perekonomian nasional, oleh karena itu BUMN harus lebih diberdayakan agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

V.1. Reformasi BUMN Gelombang Pertama

Reformasi BUMN dilakukan dalam dua gelombang, gelombang pertama dilakukan melalui proses:

1. Restrukturisasi (peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan penciptaan *core competence*)
2. Profitisasi (peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum)
3. Privatisasi (peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi serta kapabilitas tingkat dunia).

Program Restrukturisasi saat ini diprioritaskan pada sektor perbankan dan ketenagalistrikan yang menghadapi beban yang sangat berat sebagai dampak krisis ekonomi. Bank BUMN, seperti juga bank-bank lainnya, menghadapi masalah *non-performing loan* dan *negative spread* yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Restrukturisasi bank BUMN meliputi aktivitas a) pembentukan Bank Mandiri, b) restrukturisasi Bank BNI, BTN, BRI dengan cara fokus ulang segmentasi usaha, restrukturisasi aset, pemulihan aset, restrukturisasi operasional dan manajemen resiko dan c) program rekapitalisasi perbankan. Untuk sektor ketenagalistrikan, akibat dari krisis ekonomi, kelebihan pasok tenaga listrik dan melemahnya nilai mata uang rupiah telah menyebabkan terpuruknya kondisi keuangan PLN yang memerlukan restrukturisasi yang menyeluruh. Kedua program tersebut, restrukturisasi perbankan dan kelistrikan, masih dalam proses yang dilaksanakan secara konsisten.

Program profitisasi, dititik beratkan pada konsolidasi internal yaitu: fokus ulang usaha (*refocus business*), peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*), dan pengurangan biaya (*cost*

reduction). Selain itu dilaksanakan pemberdayaan manajemen, penyempurnaan organisasi dan korporatisasi perusahaan dan lain-lain untuk memungkinkan BUMN berkembang sebagai perusahaan yang sehat. Hasil yang telah dicapai dengan program privatisasi ini adalah peningkatan kinerja BUMN yang sangat signifikan. Jumlah BUMN yang sehat sekali meningkat dari 60% menjadi 68%, sedangkan yang tidak sehat menurun dari 34% ke 14%. Dari segi laba usaha terjadi peningkatan dari Rp8,5 triliun menjadi Rp17,7 triliun atau meningkat sebesar 107%.

Program privatisasi telah dilaksanakan dengan sistem yang kompetitif, transparan dan “*auditable*”. Hasil total privatisasi dari tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 sebesar USD1,039 juta atau Rp9.070 miliar. Kualitas hasil privatisasi sangat menggembirakan. Fakta menunjukkan bahwa harga jual Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok dan Unit Terminal Petikemas Surabaya misalnya, masing-masing adalah 14 x dan 18 x *Price Earning Ratio (PER)*. Angka ini adalah jauh lebih baik dibandingkan PER perusahaan sejenis di kawasan ASEAN yang hanya 6,5 x. Pada divestasi lanjutan PT Telkom (bulan Mei 1999) didapatkan harga yang setara dengan 254,4 premium dari harga rata-rata 90 hari sebelum transaksi.

V.2. Reformasi BUMN Gelombang Kedua

Sebagai langkah lanjutan dari program sebelumnya, Reformasi BUMN Gelombang Kedua merupakan upaya pemberdayaan BUMN secara mendasar dan struktural melalui pembentukan perusahaan *holding*.

Visi Reformasi BUMN Gelombang Kedua adalah menjadikan BUMN sebagai perusahaan multinasional Indonesia yang berukuran menengah, terfokus, memiliki *core competencies* tertentu. Sebagian BUMN tersebut diharapkan dapat masuk dalam kategori Fortune 500 sebagai perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta nilai tinggi.

Misi program Reformasi BUMN Gelombang Kedua adalah menjadikan BUMN sebagai instrumen untuk a) membantu menyelamatkan ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari krisis melalui percepatan pembayaran hutang Pemerintah dan perbaikan struktur penerimaan negara, b) mengejar ketinggalan daya saing perusahaan Indonesia menuju era Global 2002 dan c) meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat sangat strategisnya program ini, maka Pemerintah telah berketetapan untuk menjadikan Program Reformasi BUMN ini sebagai Agenda Nasional yang akan melibatkan semua pihak yang terkait demi kesuksesan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional.

Hasil Reformasi BUMN Gelombang Kedua diharapkan memberikan kontribusi untuk memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis; melalui a) peningkatan penciptaan nilai pasar BUMN (*market value creation*), yaitu melipatgandakan nilai yang sekarang ada, b) perolehan privatisasi untuk mempercepat pembayaran hutang Pemerintah, c) peningkatan penerimaan pajak dan dividen untuk memperbaiki struktur pendapatan negara dan d) dukungan pada proses stabilisasi ekonomi melalui pemulihan kepercayaan pasar, penguatan nilai rupiah dan peningkatan kapitalisasi pasar modal Indonesia.

V.3. Pembentukan Perusahaan *Holding* BUMN

Dasar pertimbangan pembentukan *holding* untuk memberikan fokus dan skala usaha yang ekonomis, menciptakan *corporate leverage* untuk meningkatkan *bargaining position*, menciptakan sinergi yang optimal, merasionalisasi anak perusahaan, manajemen yang mandiri dan profesional dengan *CEO* kelas dunia, serta meningkatkan transparansi kinerja melalui *global benchmarking*.

Fungsi perusahaan *holding* terutama adalah untuk mendorong proses penciptaan nilai pasar (*market value creation*), terutama mensubstitusi defisiensi manajemen di anak perusahaan, mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengakses pasar internasional, mencari pendanaan

eksternal yang lebih murah, mengalokasikan kapital dan melakukan investasi strategis dan untuk mengembangkan kemampuan manajemen puncak.

Proses penciptaan nilai akan dicapai melalui pembentukan *holding* yang akan dikelola dengan acuan pada perusahaan multinasional pemimpin industri seperti Temasek Holding (BUMN Singapura) atau GE Corporation dengan memperhatikan derajat keterkaitan usaha dan jumlah jenis usaha. Proses penciptaan nilai akan dipercepat dengan proses restrukturisasi melalui konsolidasi, rasionalisasi dan akuisisi sehingga dengan sinergi yang lebih tinggi didapatkan efisiensi yang dapat menciptakan profitabilitas yang optimum. Sedangkan proses privatisasi akan menjadi pendorong utama penciptaan nilai dan persiapan *go international*.

Privatisasi menempuh strategi dengan mengundang investor strategis (*strategic investors*) atau dapat dilakukan IPO baik pada unit usaha maupun *holding*-nya. Fakta dari proses privatisasi dengan mengundang investor strategis yang dilakukan selama ini menunjukkan adanya peningkatan nilai perusahaan yang sangat signifikan. Walaupun privatisasi mengurangi porsi kepemilikan saham pemerintah di BUMN, akan tetapi proyeksi pendapatan pemerintah dari dividen masih akan meningkat karena peningkatan profitabilitas. Namun yang lebih penting pendapatan pemerintah dari penerimaan pajak akan meningkat secara signifikan dan berkelanjutan sebagai akibat dari peningkatan daya saing dan daya cipta BUMN. Bahkan secara keseluruhan penerimaan pemerintah akan lebih tinggi dari penerimaan yang didapatkan BUMN selama ini.

Dalam proses pembentukan *holding* di samping terjadi pengurangan perusahaan, juga dimungkinkan pembentukan perusahaan-perusahaan baru sebagai akibat dari pendalaman *core business*. Sebagai contoh pada *holding* pertambangan akan dibentuk perusahaan-perusahaan yang khusus dan berdiri sendiri untuk menangani produk emas, nikel, bauksit, pasir besi dan logam mulia sebagai tanggapan atas keinginan pasar.

Pembentukan perusahaan *holding* akan diikuti kajian lebih lanjut terutama yang terkait dengan masalah pentahapan, aset-aset yang terkait dengan penguasaan pemerintah, aset-aset BUMN yang belum dapat dimasukkan dalam perusahaan *holding* dan kemungkinan pengembangan kontrak *gain-sharing* dengan perusahaan kelas dunia. Selain itu akan dikaji pula implementasi kebijakan sektoral, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Penyiapan dan pengkajian program Reformasi BUMN tersebut tengah dilakukan secara intensif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja bersama-sama manajemen BUMN. Dalam pembahasan juga melibatkan departemen teknis, Komite Kebijakan Publik/KKP, para pakar dan konsultan internasional. Diharapkan kegiatan ini akan dapat diselesaikan pada bulan September 1999.

Keberhasilan Reformasi BUMN Gelombang Kedua diharapkan akan mampu memulihkan ekonomi dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia. Tidak mustahil apabila 10 *holding* BUMN telah menjadi perusahaan Kelas Dunia, tingkat hutang Indonesia akan menjadi rendah, struktur penerimaan negara akan membaik, prasarana dan sarana umum akan dikelola secara efisien, dan pasar modal Indonesia akan berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia.

Dengan berkurangnya utang luar negeri, maka APBN akan banyak dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk peningkatan belanja pendidikan, kesehatan dan prasarana umum/sosial. Keberhasilan reformasi BUMN Gelombang Kedua akan menghasilkan ketersediaan barang dan jasa dengan harga kompetitif, perluasan kesempatan kerja melalui berkembangnya kemitraan dengan UKM dan investasi baru swasta, domestik dan asing akan mengalir kembali akibat pulihnya kepercayaan. Selain itu kepemilikan aset produktif nasional akan semakin meluas ke masyarakat banyak.

VI. PERKEMBANGAN EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN

VI.1 Perkembangan Ekspor

Nilai total ekspor Indonesia bulan Mei 1999 mencapai USD4.056,2 juta atau meningkat sebesar 5,33% dibandingkan ekspor bulan April 1999 sebesar USD3.850,9 juta. Total ekspor ini terdiri dari ekspor migas USD681,8 juta dan non migas USD3.374,4 juta. Kenaikan ekspor pada bulan Mei ini memberikan tanda-tanda positif terhadap perkembangan ekspor sebab bulan-bulan sebelumnya ekspor cenderung menurun. Namun demikian, penguatan rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi secara tajam pada bulan Juni 1999 diharapkan tidak kontra produktif terhadap perkembangan ekspor bulan-bulan mendatang. Perkembangan ekspor diharapkan lebih dipengaruhi perilaku di sektor riil dan kondisi ekonomi negara mitra dagang.

Secara kumulatif, ekspor Indonesia selama periode Januari-Mei 1999 mencapai USD18.072,9 juta, terdiri dari migas USD3.192,9 juta dan non migas USD14.880,0 juta, yang berarti masih menunjukkan penurunan 10,03% dibanding periode yang sama tahun 1998.

Tabel 3

Nilai Ekspor Indonesia Selama Periode Januari – Mei 1998 dan 1999

	Nilai CIF (Juta USD)			% Perubahan Mei 99 thd April 99	% Perubahan Jan-Mei 99 thd 98	% Peran thd Total Jan- Mei 99
	Mei 99	Jan-Mei 98	Jan-Mei 99			
Total Ekspor	4.056,2	20.087,8	18.072,9	5,33	-10,03	100,00
Migas	681,8	3.435,7	3.192,9	6,23	-7,07	17,67
- minyak mentah	359,3	1.407,1	1.555,5	8,85	10,55	8,61
- hasil minyak	82,4	337,8	284,3	36,42	-15,84	1,57
- gas	240,1	1.690,8	1.353,1	-4,46	-19,97	7,49
Non Migas	3.374,4	16.652,1	14.880,0	5,15	-10,64	82,33

Sumber: Berita Resmi Statistik Bulan Juli 1999 Badan Pusat Statistik

Penurunan ekspor dalam lima bulan pertama ini terutama dipengaruhi oleh penurunan ekspor non migas dari USD16.652,1 juta tahun yang lalu menjadi USD14.880,0 juta atau turun 10,64%. Demikian pula ekspor migas turun sebesar 7,07% menjadi USD3.192,9 juta. Peranan ekspor non migas selama lima bulan pertama tahun 1999 sebesar 82,33% atau lebih kecil 0,57 poin bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan peranan ekspor migas sebesar 17,67% diperoleh dari minyak mentah 8,61%, hasil minyak 1,57% dan gas 7,49%.

VI.2 Perkembangan Impor

Nilai impor Indonesia bulan Mei 1999 masih mengalami penurunan 6,06% dibanding impor bulan sebelumnya menjadi sebesar USD1.993,5 juta. Dengan demikian secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Mei 1999 mencapai USD9.673,0 juta yang berarti turun 13,26% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara persentase penurunan impor migas lebih besar daripada non migas. Nilai impor migas menurun 16,44% terhadap periode Januari-Mei 1998, sedangkan impor non migas menurun 12,84%.

Tabel 4**Nilai Impor Indonesia Selama Periode Januari – Mei 1998 dan 1999**

	Nilai CIF (Juta USD)			% Perubahan Mei 99 thd Apr 99	% Perubahan Jan-Mei 99 thd 98	% Peran thd Total Jan- Mei 99
	Mei 99	Jan-Mei 98	Jan-Mei 99			
Total Impor	1.993,5	11.152,2	9.673,0	-6,06	-13,26	100,00
Migas	179,3	1.316,0	1.099,6	-19,23	-16,44	11,37
- minyak mentah	99,4	393,1	556,8	-33,15	41,64	5,76
- hasil minyak	79,9	916,5	542,5	9,15	-40,81	5,61
- gas	0,0	6,4	0,3	-	-95,31	0,00
Non Migas	1.814,2	9.836,2	8.573,4	-4,53	-12,84	88,63

Sumber: Berita Resmi Statistik Bulan Juli 1999Badan Pusat Statistik

Penurunan impor migas sebesar 16,44% disebabkan oleh adanya penurunan impor hasil minyak sebesar 40,81%, dan impor gas sebesar 95,31%, meskipun impor minyak mentah meningkat sebesar 41,64%.

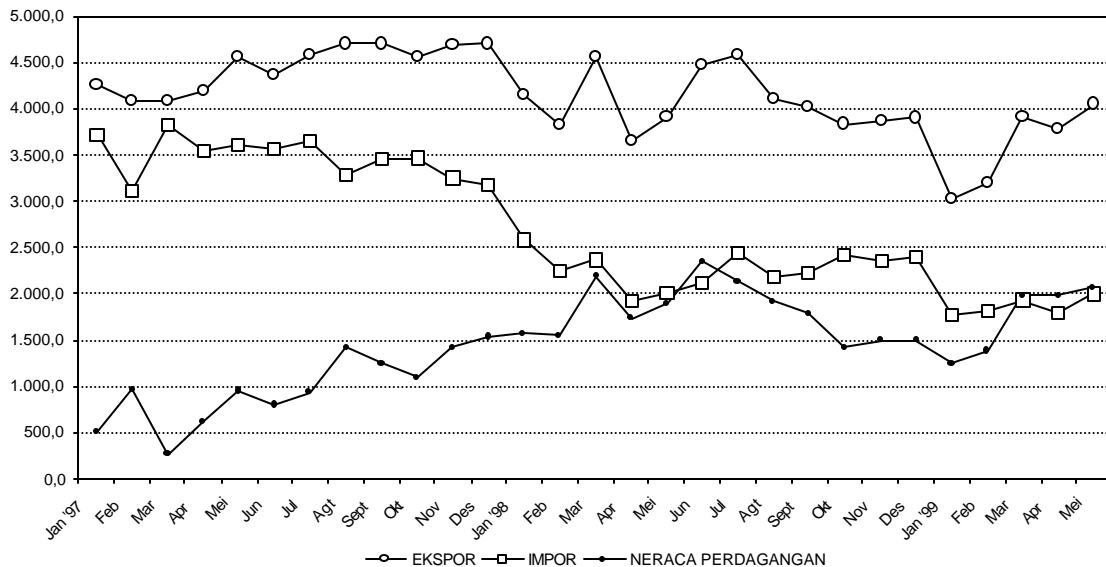
Perkembangan impor menurut golongan barang ekonomi menunjukkan bahwa impor barang konsumsi secara konsisten terus meningkat, sedangkan impor bahan baku/penolong dan barang modal menurun. Selama Januari-April 1999 impor barang konsumsi mencapai USD726,2 juta atau naik sebesar 66,56% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor bahan baku/penolong hanya mencapai USD5.719,4 juta atau turun 14,45% dan impor barang modal mencapai USD1.233,9 juta atau turun 38,52%.

VI.3 Perkembangan Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan bulan Mei 1999 mengalami surplus sebesar USD2.062,7 juta, terdiri dari surplus neraca perdagangan migas USD502,5 juta dan non migas USD1.560,2 juta. Surplus neraca perdagangan bulan Mei 1999 meningkat sebesar 8,80% terhadap bulan Mei 1998, surplus neraca perdagangan migas naik 13,76% dan surplus non migas naik sebesar 7,29%.

Gambar 10

Perkembangan Neraca Perdagangan Internasional Total Periode Januari 1997– Mei 1999



Sumber: BPS, diolah oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Neraca perdagangan periode Januari-Mei 1999 mengalami surplus sebesar USD8.399,9 juta, terdiri atas surplus migas USD2.093,3 juta dan non migas USD6.306,6 juta. Surplus neraca perdagangan Januari-Mei 1999 turun sebesar 1,25% terhadap periode Januari-Mei 1998, surplus migas turun 1,25% dan surplus non migas turun sebesar 7,47%. Grafik perkembangan ekspor dan impor dapat dilihat pada Gambar 10.

VII. PERKEMBANGAN INVESTASI

Selama periode Januari 1999 sampai dengan Juni 1999 minat investasi yang telah disetujui pemerintah, baik dalam rangka PMDN maupun PMA dapat dikemukakan sebagai berikut:

VII.1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Selama tahun 1999 (sampai dengan tanggal 15 Juni 1999), gambaran persetujuan penanaman modal dalam negeri adalah sebagai berikut:

- Jumlah proyek: 96 (jumlah proyek yang berorientasi ekspor adalah 45 proyek dengan nilai ekspor USD967,2 juta)
- Nilai investasi: Rp 11.520,9 milyar
- Jumlah tenaga kerja Indonesia: 54.593 orang

Tabel 5

Nilai Investasi Persetujuan PMDN Menurut Lokasi (1 Januari – 15 Juni 1999)

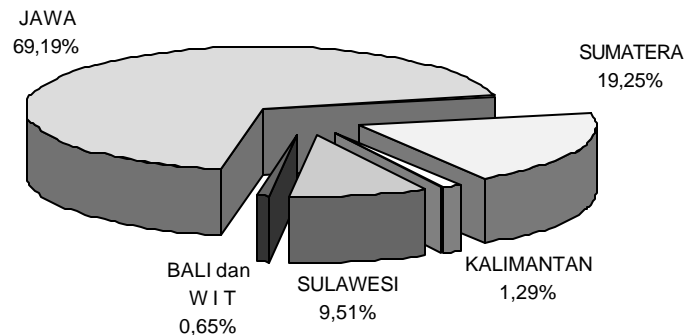
Lokasi	Jumlah Proyek	Investasi (Rp Miliar)	Prosentase
JAWA	46	7.971,5	69,19 %
SUMATERA	21	2.217,2	19,25%
KALIMANTAN	4	148,8	1,29%
SULAWESI	13	1.095,8	9,51 %
BALI dan Indonesia Timur	12	87,6	0,76 %
Total	96	Rp11.520,9	100,00%

Sumber: Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investasi yang Dilaporkan pada Sidang Kabinet EKUIN bulan Juli 1999

Bidang usaha yang banyak diminati adalah Industri makanan, Industri barang logam, Perkebunan, Industri Kimia, dan Angkutan, Gudang & Telekomunikasi. Ditinjau dari penyebaran lokasinya, persetujuan investasi proyek PMDN di Pulau Jawa dalam tahun 1999 adalah sebesar 69,19%, dan di KTI sebesar 11,2% dan seperti pada Tabel 5 dan Gambar 11.

Gambar 11

Proporsi Investasi PMDN Menurut Lokasi



Sumber: Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investasi yang dilaporkan pada Sidang Kabinet EKUIN bulan Juli 1999

VII.2. Penanaman Modal Asing

Gambaran persetujuan penanaman modal asing selama tahun 1999 sampai dengan tanggal 15 Juni 1999 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Nilai Investasi Persetujuan PMA Menurut Lokasi (Mei 1998 s.d. Juni 1999)

Lokasi	Jumlah Proyek	Investasi (ribu USD)	Prosentase
JAWA	345	1.236,7	69,12%
SUMATERA	56	329	18,39%
KALIMANTAN	7	123,3	6,89%
SULAWESI	12	31,5	1,76%
BALI dan Indonesia Timur	63	68,6	3,83%
Total	483	\$1.798,1	100,00%

Sumber: Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investasi yang dilaporkan pada Sidang Kabinet EKUIN bulan Juli 1999

- Jumlah proyek: 483 (jumlah proyek yang berorientasi ekspor adalah 311 proyek dengan nilai ekspor sebesar USD 59.875,4 juta)
- Nilai investasi: USD 1.798,1 juta
- Tenaga kerja Indonesia: 173.540 orang

Bidang usaha yang banyak diminati adalah Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa lainnya, Angkutan, Gudang & Telekomunikasi, dan Industri Kimia. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

VIII. PERKEMBANGAN PARIWISATA

Sejak akhir tahun 1997 sampai dengan saat ini, akibat terjadinya berbagai gejolak sosial dan politik, situasi dan kondisi nasional kurang menguntungkan bagi kepariwisataan. Selama tahun 1998 kunjungan wisman mengalami penurunan hampir 1 juta atau turun 18,41% terhadap tahun 1997. Penurunan sebesar kurang lebih 17% atau menjadi USD 4.401,72 juta pada tahun 1998 dibanding USD 5.321,46 pada tahun 1997 juga terjadi pada penerimaan devisa dari sektor pariwisata.

VIII.1. Jumlah Kunjungan Wisman

Setelah mengalami kenaikan sebesar 3,16% dan 11,29% pada bulan Februari 1999 dan Maret 1999, jumlah kunjungan wisman melalui 13 (tiga belas) pintu masuk pada bulan April dan Mei 1999 kembali mengalami penurunan sebesar -10,25% dan -1,73% dibandingkan jumlah wisman bulan sebelumnya. Jumlah wisman tercatat sebesar 300.511 orang pada bulan Mei 1999, sedangkan pada bulan April tercatat sebesar 305.814 orang.

Kegiatan kampanye Pemilu yang sebagian besar dilaksanakan pada bulan Mei 1999 sedikit banyak telah berpengaruh pada jumlah wisman yang datang ke Indonesia. Namun demikian bila dibandingkan dengan jumlah wisman pada bulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 22,85%. Secara kumulatif jumlah wisman selama periode Januari-Mei 1999 juga mengalami kenaikan sebesar 8,24% menjadi 1.550.048

orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

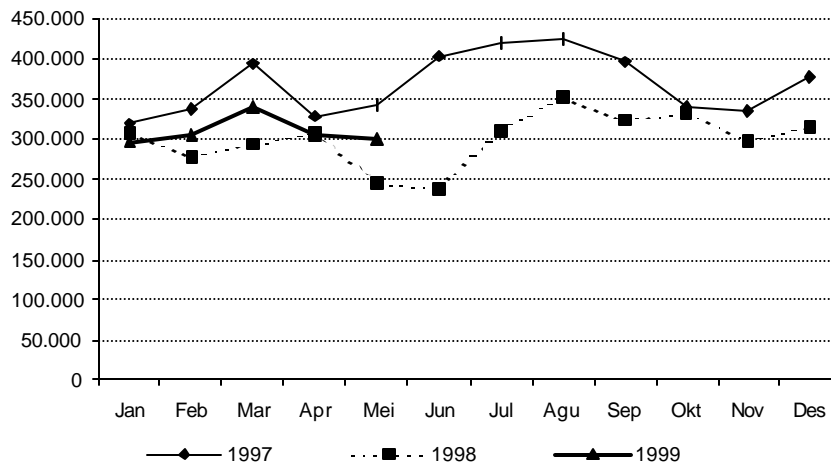
Kenaikan dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 22,85% ini cukup mengejutkan mengingat kondisi pada bulan Mei 1999 dinilai cukup rawan dengan dilaksanakannya Kampanye Pemilu 1999. Diperkirakan, wisman mulai dapat membaca situasi yang riil tentang kondisi Indonesia yang tidak seburuk dugaan sebelumnya. Diperkirakan dalam periode pasca pemilu akan terjadi kenaikan-kenaikan yang cukup berarti. Terlebih lagi jika kesan dari kondisi Jakarta yang selama ini kurang positif dari aspek keamanan bisa dipulihkan kembali.

Dilihat dari keseluruhan pintu masuk pada bulan Mei 1999, persentase kenaikan wisman terbesar selama bulan Januari-Mei 1999 terjadi di Mataram sebesar 54,66%, diikuti oleh Ngurah Rai Bali 25,51%, dan Batam sebesar 19,52%. Khusus untuk Batam, jumlah wisman yang datang sebagian besar berasal dari Singapura.

Ketika sebagian pintu masuk mengalami kenaikan jumlah wisman, pintu masuk Hasanuddin, Adi Sumarmo dan Entikong justru mengalami penurunan yang sangat tajam, masing-masing sebesar 60,65%, 51,79%, dan 4,28%. Naik turunnya jumlah wisman yang datang ke Indonesia sangat terkait dengan perkembangan sosial, politik dan keamanan di dalam negeri dalam arti suhu politik dan gejolak sosial yang meningkat dapat menjadi kontra produktif bagi jumlah wisman yang berkunjung.

Gambar 12

Fluktuasi Bulanan Kunjungan Wisman Tahun 1997-1999



Sumber: Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya *Bahan Sidang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999*

VIII.2. Perolehan Devisa Sektor Pariwisata

Berdasarkan kunjungan wisman pada bulan Mei 1999, maka devisa yang diperoleh dari wisman yang berkunjung ke Indonesia yang masuk melalui 13 pintu diperkirakan mencapai \pm USD 281,04 juta.

Perolehan devisa dari sektor Pariwisata melalui kunjungan wisman yang masuk dari 13 pintu utama pada bulan Mei 1999 diperkirakan sebesar \pm USD 281,04 juta dan secara kumulatif selama periode Januari-Mei 1999 diperkirakan sebesar \pm USD 1.449,62 juta. Dibandingkan dengan bulan Mei 1998, perolehan devisa ini mengalami kenaikan sebesar 22,19% dan secara kumulatif terjadi kenaikan sebesar 7,65%.

Tabel 7
Perbandingan Perolehan Devisa dari Pariwisata Tahun 1998-1999

BULAN	1998 (Juta USD)	1999 (Juta USD)	± (%)
Januari	288,97	277,58	-3,9
Februari	261,71	286,36	9,4
Maret	275,43	318,64	15,7
April	290,37	286,00	-1,5
Mei	229,99	281,04	22,2
Jan-Mei	1.346,48	1.449,62	7,7
Juni	241,02		
Juli	310,48		
Agustus	355,68		
September	326,22		
Oktober	336,80		
November	301,96		
Desember	320,01		
Jan-Des	3.539,66		

Sumber: Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya Bahan Rakor EKUIN Bulan Juni 1999

IX. LAJU PERTUMBUHAN PDB

IX.1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Triwulan II Tahun 1999

Sekurang-kurangnya ada tiga peristiwa yang ikut mewarnai perkembangan perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 1999. *Pertama*, stabilitas keamanan baik sebelum maupun sesudah Pemilu yang tampaknya mampu menciptakan iklim yang kondusif dan sangat positif terhadap gerak perekonomian nasional. *Kedua*, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang ternyata mampu mendukung perkembangan ekonomi Indonesia selama triwulan II tahun 1999. *Ketiga*, terdapat kecenderungan menurunnya suku bunga, terutama pada bulan terakhir triwulan II, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil pada tahun 1999.

Berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan 1993 tercatat bahwa selama triwulan II tahun 1999 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,47% terhadap triwulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 1998, PDB harga konstan pada triwulan II tahun 1999 meningkat sebesar 1,82%. Tetapi masih terdapat tiga sektor yang mengalami penurunan, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang menurun sebesar 8,54%, sektor perdagangan -4,27%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi menurun sebesar 1,35% terhadap PDB triwulan II tahun 1998. terjadi penurunan sebesar 0,27% terhadap PDB Triwulan III 1998.

Tabel 8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Menurut Lapangan Usaha (Persentase)

Lapangan Usaha	Triw II 1999 terhadap Triw I 1999	Triw II 1999 terhadap Triw II 1998
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	-3,28	7,45
2. Pertambangan dan Penggalian	0,55	1,51
3. Industri Pengolahan	0,90	5,80
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,99	0,05
5. Bangunan	-4,86	0,08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3,33	-4,27
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,53	-1,35
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Persh	0,59	-8,54
9. Jasa-Jasa	3,42	3,85
Produk Domestik Bruto	0,47	1,82
Produk Domestik Bruto tanpa Migas	0,86	1,87

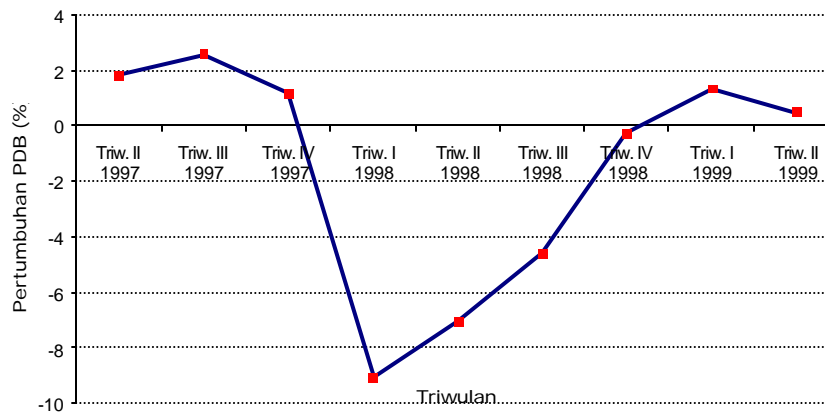
Sumber: Berita BPS, 1 Juli 1999

IX.2. Laju Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1999

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 1999 diprediksikan sudah mampu menahan laju pertumbuhan negatif. Hal ini dicerminkan oleh perkembangan PDB selama triwulan pertama dan kedua tahun 1999. Berbagai faktor seperti penguatan nilai rupiah, penurunan suku bunga bank, pemantapan stabilitas dan keamanan serta faktor positif lainnya diharapkan akan terus memiliki pengaruh positif terhadap iklim bisnis selama tahun 1999, dan mampu menggulirkan kembali roda perekonomian Indonesia.

Berdasarkan perkembangan terakhir, PDB Indonesia pada tahun 1999 diprediksikan akan mampu mencapai sekitar Rp1.075 triliun atas dasar harga berlaku. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir 14% dari PDB tahun 1998 yang hanya Rp943 triliun. Keadaan ini tampak jelas digambarkan pada penilaian PDB dengan menggunakan harga konstan 1993. PDB Indonesia tahun 1999 atas dasar harga konstan 1993 diperkirakan sekitar Rp377 triliun atau hanya meningkat sebesar 0,13% dari PDB tahun 1998. Walaupun masih sangat rendah, pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjadi momentum bangkitnya kembali perekonomian Indonesia.

Gambar 13
Selisih Perkembangan PDB Terhadap Triwulan Sebelumnya
Selama Periode Tahun 1997 - 1999



Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila dilihat lebih rinci, masih ada dua sektor yang diprediksi akan tumbuh negatif dalam tahun 1999, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang menurun sebesar $-9,20\%$ dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar $-1,04\%$, sedangkan sektor ekonomi lainnya mampu tumbuh positif. Sementara itu di antara sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yaitu masing-masing sebesar $3,28$ dan $3,29\%$. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk sektor-sektor lainnya secara berturut-turut adalah sektor jasa-jasa $2,26\%$, sektor pertanian $1,17\%$, sektor perdagangan, hotel dan restoran $0,76\%$, sektor industri pengolahan $0,37\%$, dan sektor bangunan $0,11\%$.

Krisis ekonomi yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir ini ternyata telah menyebabkan pergeseran struktur PDB Indonesia pada tahun 1998 dan 1999. Sektor pertanian yang sebelumnya semakin menurun peranannya dalam pembentukan PDB mengalami peningkatan dari $16,09\%$ pada tahun 1997 menjadi $19,54\%$ di tahun 1998 dan diperkirakan akan menjadi $19,41\%$ di tahun 1999. Sektor industri peranannya berfluktuasi dari $26,79\%$ di tahun 1997 menjadi $24,87\%$ dan $26,97\%$ pada tahun 1998 dan 1999.

Berlawanan dengan sektor-sektor tersebut di atas, peranan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan justru mengalami penurunan.

IX.3. PDB Menurut Penggunaan dan Pendapatan per Kapita

Dibandingkan triwulan pertama tahun 1999, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan II 1999 meningkat sekitar $0,45\%$. Hal ini terutama disebabkan membaiknya perekonomian yang mengakibatkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Tetapi bila dibandingkan dengan konsumsi pada triwulan II tahun 1998, pengeluaran konsumsi rumah tangga turun sekitar $1,93\%$.

Sebagai akibat dari berangsur pulihnya perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 1999, kegiatan-kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin mulai banyak dilaksanakan. Dibandingkan triwulan yang sama tahun 1998, pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 1999 mengalami kenaikan sekitar $5,05\%$.

PDB per kapita pada tahun 1999 diperkirakan mencapai Rp5,2 juta. Secara nominal PDB per kapita ini meningkat sekitar 13,04% dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 1998.

X. PERKEMBANGAN DI BIDANG HUKUM

Kebijaksanaan Reformasi Pembangunan di bidang Ekonomi meliputi Penanggulangan Krisis dan Pelaksanaan Reformasi. Penanggulangan krisis akan dapat berhasil apabila nilai tukar yang stabil dan wajar terwujud, tingkat suku bunga terkendali, laju inflasi dapat ditekan, restrukturisasi dan penyehatan perbankan terlaksana, terciptanya mekanisme penyelesaian hutang swasta, tersedianya sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat dan kegiatan produksi dihidupkan kembali, terutama yang berbasis ekonomi rakyat serta berorientasi ekspor.

Pelaksanaan reformasi di bidang ekonomi diwujudkan melalui kebijaksanaan makro dan mikro yang transparan. Lembaga keuangan terutama di sektor perbankan dibenahi, perekonomian berjalan secara efisien dan kompetitif tanpa berbagai praktek monopoli. Pemerintah harus benar-benar transparan dalam pengelolaan usaha agar korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan rakyat dapat dieliminasi semaksimal mungkin. Penyelenggaraan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah harus segera dilakukan.

Sebagai dasar yang kuat dalam merealisasikan agenda penanggulangan krisis dan reformasi di bidang ekonomi tersebut di atas, diperlukan perubahan, pencabutan, pembaruan, dan penegakan seluruh peraturan dan perundangan yang terkait.

Produk peraturan dan perundangan di bidang ekonomi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden yang telah dihasilkan selama Kabinet Reformasi Pembangunan meliputi 10 (sepuluh) Undang-Undang, 46 (empat puluh enam) Peraturan Pemerintah, 112 (seratus dua belas) Keputusan Presiden dan 10 (sepuluh) Instruksi Presiden.